

# Pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender Dan Indeks Ketimpangan Gender Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat

Yonathan Kristiantoro \*<sup>1</sup>  
M Afdal Samsuddin <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung, Indonesia  
\*e-mail : Yonathankristiantoro15@gmailcom <sup>1</sup>, [mafdal@gmail.ubb.ac.id](mailto:mafdal@gmail.ubb.ac.id) <sup>2</sup>

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Menggunakan metode panel data dari 27 kabupaten/kota selama periode 2019–2024, studi ini menemukan bahwa hanya IKG yang berpengaruh signifikan terhadap Gini Ratio, dengan koefisien negatif sebesar  $-0.153$  dan tingkat signifikansi tinggi ( $p$ -value  $0.0000$ ). Ini menunjukkan bahwa semakin besar ketimpangan gender di suatu wilayah, maka ketimpangan distribusi pendapatan juga cenderung meningkat. Sebaliknya, IPG tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, meskipun secara teoritis memiliki arah hubungan negatif terhadap Gini Ratio. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan perempuan yang tercermin dalam IPG belum cukup efektif dalam memperbaiki keadilan distribusi ekonomi di Jawa Barat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan yang tidak hanya meningkatkan representasi perempuan, tetapi juga memastikan keterlibatan mereka dalam sektor ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Implikasi kebijakan dari penelitian ini penting untuk mendukung agenda pembangunan yang inklusif dan berbasis kesetaraan gender. Oleh karena itu, upaya menurunkan ketimpangan pendapatan harus dibarengi dengan strategi sistemik untuk mengurangi ketimpangan gender.

**Kata kunci:** Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Ketimpangan Gender, Ketimpangan Pendapatan

## Abstract

This study aims to analyze the effect of the Gender Empowerment Index (GPI) and Gender Inequality Index (GII) on income inequality in West Java Province. Using panel data from 27 districts/municipalities over the 2019-2024 period, this study found that only IKG has a significant effect on the Gini Ratio, with a negative coefficient of  $-0.153$  and a high significance level ( $p$ -value  $0.0000$ ). This indicates that the greater the gender inequality in a region, the more inequality in income distribution tends to increase. In contrast, the GNI does not show a significant effect, although theoretically it has a negative direction on the Gini Ratio. These results indicate that women's empowerment, as reflected in the GNI, has not been effective in improving economic distribution equity in West Java. This study recommends the need to strengthen policies that not only increase women's representation, but also ensure their involvement in productive and sustainable economic sectors. Therefore, efforts to reduce income inequality must be accompanied by a systemic strategy to reduce gender inequality.

**Keywords:** Gender Empowerment Index, Gender Inequality Index, Income Inequality

## PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Barat, sebagai wilayah dengan populasi yang padat dan latar belakang demografis yang sangat beragam, menghadapi dinamika ketimpangan gender yang kompleks dan masih menjadi tantangan krusial dalam agenda pembangunan daerah. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) menunjukkan peningkatan dari 71,22 pada tahun 2022 menjadi 72,76 pada tahun 2024. Tren ini mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai sektor kehidupan sosial dan ekonomi. Meskipun demikian, tingkat ketimpangan gender masih berada pada level yang cukup tinggi, meskipun cenderung menurun secara gradual. Hal ini tercermin dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang mencapai angka 89,80 pada tahun 2022, suatu nilai yang turut dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk dan ketimpangan akses antarwilayah dalam provinsi ini (Sagita *et al.*, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh (Abidin *et al.*, 2022) menegaskan bahwa pendidikan perempuan merupakan faktor determinan yang memberikan kontribusi paling signifikan

terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Gender di Jawa Barat. Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan bagi perempuan tidak hanya berdampak pada pengembangan kapabilitas individu, tetapi juga membawa dampak sistemik terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam konteks pembangunan manusia, kesenjangan gender dalam hal akses terhadap pendidikan, lapangan pekerjaan, dan pelayanan kesehatan menjadi isu sentral yang perlu diatasi secara komprehensif. Ketika perempuan memperoleh pendidikan yang layak, mereka cenderung memiliki peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, mendukung ekonomi rumah tangga, serta menjadi agen perubahan dalam pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (Haliza *et al.*, 2024).

Keadilan dalam ketimpangan pendapatan sangat erat kaitannya dengan tingkat pemberdayaan perempuan dan rendahnya ketimpangan gender. Beberapa studi terdahulu telah mengidentifikasi sejumlah variabel yang memengaruhi Indeks Pembangunan Gender di Jawa Barat, antara lain angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran berdasarkan gender, serta partisipasi perempuan dalam lembaga legislative (Y. Sari *et al.*, 2020). Model regresi nonparametrik spline yang digunakan dalam penelitian (S. U. R. Sari, 2018) bahkan mencatat nilai koefisien determinasi sebesar 95,18 persen, mengindikasikan kekuatan hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan pencapaian pembangunan berbasis gender.

Dalam penelitian ini, ketimpangan gender masih menjadi salah satu hambatan struktural yang signifikan terhadap tercapainya ketimpangan pendapatan yang adil di berbagai wilayah Jawa Barat (Judijanto *et al.*, 2024) oleh sebab itu, penelitian ini diarahkan untuk mengeksplorasi lebih jauh pengaruh dari Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Ketimpangan Gender terhadap pola ketimpangan pendapatan di provinsi ini. Dengan menggabungkan data statistik terkini dan temuan-temuan empiris sebelumnya, studi ini diharapkan mampu merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dan berbasis bukti untuk mendorong percepatan kesetaraan gender serta pemerataan kesejahteraan ekonomi. Kontribusi penelitian ini tidak hanya penting dalam konteks keadilan sosial, tetapi juga sangat relevan dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat regional.

## LITERATUR REVIEW

Berbagai hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak selalu sejalan dengan pencapaian pemerataan distribusi pendapatan. Provinsi Jawa Barat, misalnya, memiliki indeks Gini yang konsisten berada di atas angka 0,4, yang mengindikasikan tingginya tingkat ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ini sangat erat kaitannya dengan masih terbatasnya pemberdayaan perempuan dan tingginya ketimpangan gender di wilayah tersebut (Harjanto & Ariyani, 2019). Dalam konteks ini, studi yang dilakukan di Provinsi Bali menunjukkan bahwa meskipun peningkatan pendapatan perempuan belum berkontribusi signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, hal tersebut mampu mendorong perbaikan distribusi pendapatan. Temuan ini mempertegas pentingnya program pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi (Judijanto *et al.*, 2024). Sebaliknya, penelitian di Provinsi Aceh mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan perempuan dapat menurunkan tingkat kemiskinan, namun di sisi lain justru memperbesar ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan karena kontribusi ekonomi perempuan cenderung terkonsentrasi pada rumah tangga berpenghasilan tinggi (Ikhsan & Zulkifli, 2022).

Studi yang dilakukan oleh (Marsudi *et al.*, 2020) mengonfirmasi bahwa ketimpangan gender berdampak negatif secara signifikan terhadap pendapatan per kapita nasional. Setiap penurunan satu poin dalam Indeks Ketimpangan Gender (GII) dapat meningkatkan pendapatan per kapita sebesar 0,65% hingga 0,71%. Hal ini memperkuat argumen bahwa pengurangan ketimpangan gender memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan ekonomi. Selain itu, (Apriliani, 2024) menemukan bahwa ketimpangan gender juga berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sehingga keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja menjadi krusial dalam kerangka kebijakan ekonomi. Dalam kajiannya, (Syafitri & Susilo, 2025) menggunakan pendekatan panel dinamis yang menunjukkan bahwa Gender

Equality Index (GEI) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang, namun memberikan efek dalam jangka pendek. Di sisi lain, variabel rata-rata lama sekolah perempuan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan baik dalam jangka pendek maupun panjang, menunjukkan bahwa pendidikan perempuan merupakan determinan penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

Dalam konteks pembangunan inklusif, (Mafida Amalia *et al.*, 2023) menegaskan bahwa indikator pemberdayaan perempuan seperti partisipasi perempuan dalam bidang profesional dan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal serupa ditemukan oleh (Muhammad *et al.*, 2024) yang mencatat bahwa GII, GEI, rasio ketergantungan, dan rasio Gini memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Sebaliknya, Gender Development Index (GDI) menunjukkan pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, menandakan bahwa pembangunan berbasis kesetaraan gender dapat mempercepat pengurangan kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh (Li, 2023) terhadap 96 negara juga menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam bidang kesehatan reproduksi, partisipasi kerja, dan kesetaraan gender secara keseluruhan memiliki dampak signifikan dalam menekan ketimpangan distribusi pendapatan. Namun, indikator lain seperti hak politik dan akses pendidikan tidak menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap ketimpangan pendapatan dalam studi tersebut.

Laporan dari Dana Moneter Internasional (IMF) juga mengonfirmasi temuan serupa, di mana peningkatan nilai GII berkorelasi positif dengan peningkatan ketimpangan pendapatan, yang menunjukkan hubungan kausal antara ketimpangan gender dan distribusi ekonomi (Gonzales, 2015). Penelitian oleh (Yohana & Msoka, 2022) menambahkan bahwa ketimpangan gender, khususnya dalam hal pendidikan menengah, turut memengaruhi distribusi kekayaan antar rumah tangga. Sementara itu, laporan (World Economic Forum, 2024) menyajikan gambaran komprehensif mengenai kesenjangan gender global, mencakup dimensi partisipasi ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan politik. Laporan ini menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada negara yang mencapai kesetaraan gender secara menyeluruh, dan kesenjangan masih terjadi secara signifikan di berbagai sektor.

(Wisnujati, 2020) menunjukkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), melalui indikator seperti keterwakilan perempuan dalam parlemen, keterlibatan dalam profesi profesional, serta kontribusi pendapatan perempuan, dapat digunakan sebagai alat ukur yang efektif untuk mengevaluasi peran aktif perempuan dalam ranah ekonomi dan politik. Sementara itu, (Tusianti, 2017) menegaskan bahwa IKG berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, menyoroti pentingnya integrasi prinsip kesetaraan gender dalam strategi pembangunan ekonomi nasional. (Aninditya Yuniar, 2022) juga menekankan bahwa sub-indeks dalam indeks kesetaraan gender memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan dalam pencapaian pembangunan manusia, sehingga memperkuat urgensi penerapan kebijakan yang berbasis kesetaraan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya (Sultan, 2025) menunjukkan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu menurunkan angka pengangguran, meskipun efeknya sangat bergantung pada dinamika internal ketenagakerjaan di daerah tersebut.

Secara keseluruhan, mayoritas literatur nasional maupun internasional sepakat bahwa pemberdayaan perempuan serta pengurangan ketimpangan gender merupakan faktor kunci dalam menciptakan ketimpangan pendapatan yang lebih adil. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan kajian, khususnya terkait kurangnya penelitian yang secara spesifik mengkaji hubungan langsung antara Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terhadap ketimpangan pendapatan pada level provinsi. Hal ini menjadi relevan untuk diteliti lebih lanjut, terutama di Provinsi Jawa Barat yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi unik serta tingkat ketimpangan yang relatif tinggi.

## METODE

Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan data panel, yang merupakan kombinasi antara data cross-section dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan data time-series untuk periode 2019 hingga 2024. Pendekatan ini dipilih untuk

mengkaji dinamika hubungan antarvariabel secara simultan dalam dimensi spasial dan temporal. Analisis deskriptif kualitatif berfungsi untuk menyajikan pemaparan yang sistematis, objektif, dan faktual mengenai kondisi Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), serta ketimpangan pendapatan di masing-masing wilayah administratif.

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyediakan indikator-indikator pembangunan gender serta data pendapatan regional per kapita. Dengan mengintegrasikan pendekatan panel data, penelitian ini mampu menggambarkan pola keterkaitan antarvariabel secara lebih mendalam dan menyeluruh. Hal ini memungkinkan penelusuran variasi antarwilayah sekaligus menangkap perubahan yang terjadi sepanjang periode waktu tertentu, sehingga hasil analisis memiliki validitas yang lebih tinggi dalam menginterpretasikan kecenderungan empiris terkait pembangunan gender dan ketimpangan ketimpangan pendapatan di Jawa Barat.

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

- $Y_{it}$  = Gini Ratio
- $\alpha$  = Konstanta
- $X_{1it}$  = Indeks Pemberdayaan Gender kota ke-i dan tahun ke-t
- $X_{2it}$  = Indeks Ketimpangan Gender kota ke-i dan tahun ke-t
- $i$  = Tempat
- $t$  = Waktu
- $\beta_1 \beta_2$  = Koefisien Regresi Variabel X
- $\epsilon_{it}$  = Error

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

- Uji Chow

Tabel 1. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.821621	(26,133)	0.0000
Cross-section Chi-square	173.59744226		0.0000

Hasil uji Chow yang ditunjukkan oleh nilai Cross-section F sebesar 9.821621 dan Cross-section Chi-square sebesar 173.597442, dengan nilai probabilitas (p-value) 0.0000 pada kedua uji, mengindikasikan bahwa model common effect tidak memadai dan terdapat perbedaan signifikan antar unit cross-section (kabupaten/kota) dalam mempengaruhi variabel dependen. Dengan demikian, hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima, yang berarti model Fixed Effect adalah model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini karena mampu menangkap pengaruh spesifik tiap daerah terhadap ketimpangan pendapatan berdasarkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Jawa Barat.

- Uji Hausman

Tabel 2. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.124014	2	0.2097

Hasil uji Hausman menunjukkan nilai statistik Chi-Square sebesar 3.124014 dengan derajat bebas 2 dan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0.2097, yang berarti lebih besar dari taraf signifikansi 0.05. Dengan demikian, hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa model fixed effect ditolak, dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima, sehingga model random effect dinyatakan lebih tepat digunakan. Oleh karena itu, dalam konteks pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat, model random effect dipilih karena mampu menggambarkan pengaruh karakteristik khusus tiap kabupaten/kota secara lebih akurat.

- Uji Lorange Multiplier

Tabel 3. Lorange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	130.4819 (0.0000)	0.243091 (0.6220)	130.7250 (0.0000)
Honda	11.42287 (0.0000)	-0.493043 --	7.728552 (0.0000)
King-Wu	11.42287 (0.0000)	-0.493043 --	4.136000 (0.0000)
Standardized Honda	11.95219 (0.0000)	-0.217211 --	4.410540 (0.0000)
Standardized King-Wu	11.95219 (0.0000)	-0.217211 --	1.412376 (0.0789)
Gourierioux, et al.*	--	--	130.4819 ( $< 0.01$ )

Hasil uji Lorange Multiplier menunjukkan nilai cross section sebesar 0.0000, yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05. Dengan demikian, hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa model common effect ditolak, dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima, sehingga model random effect dinyatakan lebih tepat digunakan. Oleh karena itu, dalam konteks pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat, model random effect dipilih karena mampu menggambarkan pengaruh karakteristik khusus tiap kabupaten/kota secara lebih akurat.

- Uji T

Tabel 4. Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.439165	0.012960	33.88694	0.0000
IPG	-6.594007	4.535506	-0.145430	0.8846
IKG	-0.152789	0.028594	-5.343420	0.0000

R-squared	0.154770	Mean dependent var	0.371580
Adjusted R-squared	0.144139	S.D. dependent var	0.043221
			-
S.E. of regression	0.039985	Akaike info criterion	3.582267
			-
Sum squared resid	0.254212	Schwarz criterion	3.525089
			-
Log likelihood	293.1636	Hannan-Quinn criter.	3.559052
F-statistic	14.55729	Durbin-Watson stat	0.685987
Prob(F-statistic)	0.000002		

Berdasarkan hasil uji t yang diperoleh dari output regresi, dapat diuraikan bahwa dari kedua variabel yang dianalisis yakni Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) hanya variabel IKG yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan pada tingkat signifikansi 5%. Bukti signifikan ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar 0.0000, yang secara substansial berada di bawah ambang batas 0.05, serta nilai t-statistic yang mencapai -5.343. Nilai ini tidak hanya menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik, tetapi juga mengindikasikan kekuatan pengaruh yang cukup besar. Secara substansial, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada nilai IKG akan berdampak pada penurunan distribusi pendapatan sebesar 0.152789 poin. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa semakin tinggi tingkat ketimpangan gender dalam suatu wilayah, maka kecenderungan distribusi pendapatan menjadi lebih tidak merata. Dengan kata lain, ketimpangan gender berkontribusi terhadap melemahnya keadilan distribusi ekonomi.

Di sisi lain, variabel IPG tidak menunjukkan signifikansi statistik dalam memengaruhi distribusi pendapatan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0.8846, yang jauh melebihi ambang signifikansi 5%, serta nilai t-statistic sebesar -0.145, yang menunjukkan bahwa variabel ini tidak memiliki pengaruh yang dapat diandalkan secara statistik. Hasil ini mengindikasikan bahwa, dalam model regresi yang digunakan, IPG tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap variasi distribusi pendapatan. Secara teoritis, hal ini mungkin mengindikasikan bahwa pemberdayaan gender, sebagaimana direpresentasikan oleh IPG, belum cukup kuat atau merata untuk memberikan dampak nyata terhadap aspek ekonomi makro seperti distribusi pendapatan. Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong pemberdayaan perempuan mungkin perlu dipertimbangkan kembali efektivitasnya dalam konteks pemerataan distribusi ekonomi.

Sementara itu, nilai konstanta dalam model, yakni sebesar 0.439165, juga menunjukkan signifikansi statistik yang tinggi, dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Signifikansi konstanta ini menandakan bahwa ketika nilai IPG dan IKG diasumsikan berada pada titik nol, maka distribusi pendapatan dasar berada pada tingkat 0.439165. Dengan kata lain, nilai ini menggambarkan intercept atau nilai awal distribusi pendapatan sebelum dipengaruhi oleh variabel-variabel independen dalam model. Walaupun dalam praktiknya nilai nol untuk IPG dan IKG tidak realistis, informasi ini tetap penting untuk memahami struktur model regresi secara keseluruhan. Dengan demikian, temuan empiris ini menegaskan bahwa dalam kerangka model yang digunakan, hanya IKG yang memiliki pengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan, sedangkan IPG tidak menunjukkan kontribusi yang berarti secara statistik.

- Analisis Persamaan Regresi

$$\text{GINIRATIO} = 0.439164653665 - 6.5882959700107 \cdot \text{IPG} - 0.152788819888 \cdot \text{IKG}$$

Nilai konstanta sebesar 0.439165 mengindikasikan bahwa jika nilai IPG dan IKG sama dengan nol, maka nilai dasar Gini Ratio diperkirakan sebesar 0.439. Koefisien IPG sebesar -6.588 menandakan bahwa setiap peningkatan 1 poin pada IPG yang mencerminkan meningkatnya

pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan berpotensi menurunkan Gini Ratio sebesar 6.588 poin, yang berarti distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Namun, berdasarkan uji statistik sebelumnya, pengaruh IPG ini tidak signifikan secara statistik, sehingga hasil tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan kebijakan. Sebaliknya, koefisien IKG sebesar -0.153 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu poin dalam Indeks Ketimpangan Gender akan menurunkan Gini Ratio sebesar 0.153 poin, yang secara empiris menunjukkan bahwa semakin besar ketimpangan gender.

- Analisis Hasil Koefisien Determinan ( $R^2$ )
  - R-squared 0.154770 menunjukkan bahwa sekitar 15,47% variasi dalam ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan oleh model, yaitu oleh variabel IPG dan IKG. Sisanya, sebesar 84,53%, dijelaskan oleh faktor lain di luar model.
  - Adjusted R-squared 0.144139 nilai ini merupakan penyesuaian dari R-squared yang mempertimbangkan jumlah variabel dalam model. Nilai 14.41% menunjukkan bahwa setelah dikoreksi terhadap jumlah variabel, model masih mampu menjelaskan sebagian kecil variasi ketimpangan pendapatan secara cukup baik, meskipun kontribusinya tidak terlalu besar.

## DISKUSI

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dalam penelitian ini, ditemukan bahwa variabel Indeks Ketimpangan Gender (IKG) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Nilai koefisien regresi sebesar -0.153 dengan nilai probabilitas 0.0000 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu poin pada IKG akan menurunkan Gini Ratio sebesar 0.153 poin. Artinya, semakin tinggi nilai IKG yang menunjukkan ketimpangan gender semakin besar, maka distribusi pendapatan akan semakin tidak merata. Hasil ini sejalan dengan berbagai studi terdahulu, seperti yang disampaikan oleh (Marsudi *et al.*, 2020) yang menunjukkan bahwa ketimpangan gender secara signifikan berdampak negatif terhadap pendapatan per kapita nasional. Bahkan, pengurangan ketimpangan gender dinyatakan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara umum.

Sebaliknya, variabel Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dalam penelitian ini menunjukkan koefisien negatif sebesar -6.588, yang secara teori berarti bahwa peningkatan pemberdayaan perempuan dapat menurunkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Namun demikian, nilai probabilitas yang sangat tinggi, yaitu 0.8846, menunjukkan bahwa pengaruh IPG terhadap Gini Ratio tidak signifikan secara statistik. Ini mengindikasikan bahwa meskipun pemberdayaan perempuan secara teoritis dapat memperbaiki keadilan distribusi pendapatan, implementasi dan dampaknya di Jawa Barat belum cukup kuat untuk menghasilkan perbedaan yang nyata. Hasil ini sesuai dengan temuan (Judijanto *et al.*, 2024) yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan perempuan belum berkontribusi signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, namun bisa memperbaiki distribusi pendapatan.

Perbedaan antara signifikansi IKG dan ketidaksignifikansi IPG dalam model ini juga dapat dijelaskan melalui konteks sosial dan ekonomi lokal di Jawa Barat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa meskipun perempuan mulai mendapatkan akses yang lebih besar dalam pendidikan dan pekerjaan, kontribusi mereka terhadap ekonomi masih terkonsentrasi dalam sektor informal atau rumah tangga berpendapatan menengah ke atas. (Ikhsan & Zulkifli, 2022) mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan perempuan justru memperbesar ketimpangan ketika kontribusi tersebut tidak tersebar merata di seluruh lapisan masyarakat. Ini mungkin terjadi pula di Jawa Barat, sehingga IPG belum menunjukkan pengaruh nyata terhadap Gini Ratio.

Lebih jauh, hasil ini juga memperkuat argumen dalam literatur bahwa pengurangan ketimpangan gender memiliki efek yang lebih konsisten terhadap ketimpangan pendapatan dibandingkan hanya dengan meningkatkan pemberdayaan tanpa mengatasi akar ketimpangan struktural. (Apriliani, 2024) dan laporan IMF (Gonzales, 2015) menegaskan bahwa ketimpangan gender memiliki korelasi langsung dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Dengan

demikian, upaya untuk memperbaiki distribusi pendapatan perlu diarahkan pada strategi yang menurunkan ketimpangan gender secara sistemik, seperti memastikan akses yang setara terhadap pekerjaan layak, pendidikan menengah, dan layanan kesehatan, daripada hanya mendorong keterlibatan simbolik perempuan dalam ruang publik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa dalam konteks Provinsi Jawa Barat, ketimpangan gender (IKG) merupakan faktor yang secara nyata memengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan, sementara pemberdayaan gender (IPG) belum memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, strategi kebijakan ke depan sebaiknya tidak hanya berfokus pada peningkatan indikator pemberdayaan, tetapi juga memperhatikan bagaimana perempuan dapat berkontribusi secara adil dan merata dalam sektor ekonomi. Ini menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih menyeluruh dan berbasis data dalam merancang program pembangunan inklusif berbasis gender, agar benar-benar berdampak pada pemerataan distribusi pendapatan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data panel dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2019–2024, penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender, yang diukur melalui Indeks Ketimpangan Gender (IKG), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin tinggi IKG, semakin tidak merata distribusi pendapatan di wilayah tersebut, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien negatif sebesar  $-0.153$  dengan tingkat signifikansi tinggi ( $p\text{-value} = 0.0000$ ). Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender merupakan faktor struktural yang memengaruhi keadilan ekonomi secara nyata. Sebaliknya, variabel Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meskipun memiliki koefisien negatif besar ( $-6.588$ ), tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Gini Ratio, yang berarti pemberdayaan perempuan sebagaimana direpresentasikan dalam IPG belum mampu secara empiris menekan ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Barat.

Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan peran perempuan dalam politik, ekonomi, dan pendidikan masih belum cukup kuat untuk menciptakan dampak sistemik terhadap distribusi ekonomi yang lebih merata. Kesenjangan antara indikator pemberdayaan dan realitas kontribusi ekonomi perempuan menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan pemberdayaan gender. Perempuan mungkin telah memperoleh akses lebih luas ke ruang publik, namun partisipasi tersebut belum menyentuh aspek produktif yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tidak hanya meningkatkan angka partisipasi perempuan, tetapi juga memastikan bahwa partisipasi tersebut memberikan dampak nyata terhadap perbaikan distribusi pendapatan di level daerah.

## SARAN

Berdasarkan permasalahan dan hasil temuan tersebut, perlunya upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti:

- Perluasan Akses Ekonomi bagi Perempuan  
Pemerintah daerah perlu mendorong kebijakan afirmatif yang memfasilitasi perempuan agar tidak hanya terlibat secara simbolik dalam sektor publik, tetapi juga memiliki peran substansial dalam aktivitas ekonomi produktif, khususnya sektor formal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan berupa pelatihan keterampilan, akses modal, dan perlindungan hukum harus diperkuat.
- Integrasi Gender dalam Perencanaan Pembangunan Daerah  
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat harus mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap perencanaan dan evaluasi pembangunan ekonomi, dengan

menargetkan pengurangan IKG melalui peningkatan akses terhadap pendidikan menengah, kesehatan reproduktif, dan peluang kerja yang inklusif bagi perempuan.

- Penguatan Data dan Monitoring Gender  
Diperlukan sistem data terintegrasi dan transparan yang secara berkala memantau perkembangan IPG dan IKG di seluruh daerah. Hal ini penting untuk merancang kebijakan berbasis bukti dan mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan perempuan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z., Arif, M., & Abroroh, S. A. (2022). Studi keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif dalam indeks pembangunan gender di Provinsi Jawa Barat. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 2(1), 23–36. <https://doi.org/10.53088/jerps.v2i1.385>
- Aninditya Yuniar, A. F. Y. (2022). Pengaruh Kesetaraan Gender terhadap Ketimpangan Capaian Pendidikan di Indonesia Tahun 2015–2019. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 22(1), 116–130. <https://doi.org/10.21002/jepi.2022.07>
- Apriliani, N. (2024). *PENGARUH KETIMPANGAN GENDER DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2018-2023 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*.
- Gonzales, C. (2015). Catalyst for Change: Empowering Women and Tackling Income Inequality. *Staff Discussion Notes*, 15(20), 1. <https://doi.org/10.5089/9781513533384.006>
- Haliza, F. N., Kistanti, N. R., Gender, I. P., Kapita, P. P., Ekonomi, P., Lama, R., Partisipasi, T., & Kerja, A. (2024). *INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN GENDER*. 5(2), 72–92.
- Harjanto, T., & Ariyani, R. M. (2019). Distribusi Pendapatan Di Indonesia. *CENDEKIA Jaya*, 1(2), 29–41. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v1i2.33>
- Ikhsan, & Zulkifli. (2022). Pengaruh Pendapatan Perempuan Terhadap Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan: Bukti Data Panel Di Aceh. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 184–190. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.581>
- Judijanto, L., Kartika Devi, E., Fatimah, S., & Susanti, P. (2024). Pengaruh Kebijakan Pendidikan dan Distribusi Pendapatan terhadap Ketimpangan Ekonomi di Indonesia. *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(03), 178–187. <https://doi.org/10.58812/sek.v2i03.405>
- Li, Y. (2023). *The Impact of Female Empowerment on Income Inequality—Evidence from 96 Countries*. 726–732. [https://doi.org/10.2991/978-94-6463-042-8\\_104](https://doi.org/10.2991/978-94-6463-042-8_104)
- Mafida Amalia, A., Rahmawati, F., & Nuraini Dwi Putri, I. (2023). The Influence of Women's Development and Empowerment on Inclusive Economic Growth. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 2(5), 546–559. <https://doi.org/10.54408/jabter.v2i5.198>
- Marsudi, E., Makmur, T., & Syafitri, Y. (2020). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Padi dan Perkembangannya di Provinsi Aceh. *Jurnal Agrisepe*, 21(2), 51–60. <https://doi.org/10.17969/agrisepe.v21i2.17220>
- Muhammad, F., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2024). *The Nexus of Gender Inequality and Poverty Rate in Indonesia*. 22(1), 51–58.
- Sagita, A. M. B., Triningsih, A., & Sobariah, S. S. (2023). Hubungan Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. *Seminar Nasional Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2).
- Sari, S. U. R. (2018). Aplikasi Metode Regresi Nonparametrik Spline Multivariabel Untuk Pemodelan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah ...*, 6(2), 119–129. <http://103.97.100.145/index.php/statistik/article/view/4316>
- Sari, Y., Nasrun, A., & Putri, A. K. (2020). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2017. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.33019/equity.v8i1.9>
- Sultan, M. A. S. (2025). *Analisis hubungan kausalitas inflasi, ipm, kemiskinan, dan pengangguran di*

- provinsi nusa tenggara timur. 02*, 84–90.
- Syafitri, A. E., & Susilo, J. H. (2025). *Dynamic Panel Data Analysis of Income Inequality in Indonesia*. *14*(1), 149–162.
- Tusianti, E. (2017). *Kajian Awal Indeks Ketimpangan Gender 2016* (Issue August).
- Wisnujati, N. S. (2020). Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender Dan Indeks Pembangunan Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, *20*(2), 67–81. <https://doi.org/10.30742/jisa20220201224>
- World Economic Forum. (2024). *Global Gender Gap 2024. Insight Report* (Issue June). [https://www3.weforum.org/docs/WEF\\_GGGR\\_2024.pdf](https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2024.pdf)
- Yohana, B. S., & Msoka, J. (2022). *Does Gender Inequality Affect the Wealth and Income Distribution Among the Household Member ? Evidenced from Tanzania HIV Impact Survey ( THIS2015 / 2016 )*.